



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : JURAIDA

Nim : 07.93.0017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Kamis, 15 Juli 2010

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. dr. C. Tjahjono Kuntjoro, PhD
2. Yovita Indrayati, SH, MIHum
3. Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN




(.....)

(.....)

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Kamis, 15 Juli 2010



(Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN)
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Juraida Situmorang , peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 07.93.0017,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Agustus 2010

Juraida Situmorang

ABSTRAK

Melihat besarnya masyarakat yang menggunakan pelayanan PTM di puskesmas, maka perlunya petugas yang terkait untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hakikat pelayanan kesehatan adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Disadari bersama bahwa tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena negara sudah menyerahkan seluruh pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan kepada pemerintah, sehingga pemerintah wajib melaksanakan fungsi pelayanan dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan kepuasan masyarakat. Kebijakan pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, senantiasa harus memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat, dan terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu ciri keberhasilan suatu lembaga/instansi pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penanganan dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, faktor apa saja yang menjadi kendala serta solusi yang dapat dilakukan untuk mentasai kendala dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penanganan dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Puskesmas, yang merupakan unit organisasi fungsional dari Dinas Kesehatan kabupaten mempunyai 3 fungsi utama yaitu sebagai pusat pengembangan kesehatan wilayah, Pemberi pelayanan kesehatan dan kedokteran secara menyeluruh (holistic), paripurna, terpadu dan berkesinambungan kepada rakyat di wilayah kerja dan Pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan. Staf puskesmas masih merasa wajib menjalankan semua program pokok puskesmas tersebut ditambah lagi dengan beberapa program baru yang ditawarkan oleh Dirjen Binkesmas Depkes RI. Puskesmas sebenarnya tidak wajib melaksanakan ke-16-18 program pokok tersebut jika kemampuan staf untuk melakukannya tidak memadai. Tidak semua program tersebut mampu dilaksanakan oleh staf Puskesmas secara efektif dan berkualitas. Hambatan yang timbul adalah masalah Pendanaan. Pembangunan sumber daya manusia-pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial-masih belum diperhatikan. Puskesmas belum dilihat sebagai alat untuk memelihara kesehatan penduduk dan Untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, lanjut Umar, semua Puskesmas mengalami masalah. Solusi yang dapat dilakukan adalah Pemerintah harus memperhatikan tata letak pembangunan puskesmas yang strategis, penugasan dokter, serta penyediaan obat-obatan.

pelaporan harus diperketat dan program-program yang ada ditingkatkan seperti kerja sama Dinkes dengan camat untuk mengenalkan puskesmas ke masyarakat dan hal terpenting adalah dana operasional untuk puskesmas, hal ini disebabkan karena terkadang petugas mengeluhkan dana untuk operasional yang lama turunnya menyebabkan puskesmas dalam pelaksanaan program dan usahanya terlambat.

Kata Kunci : Penanganan Dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Puskesmas



Abstract

Given the large community that uses the PTM service center, hence the need for relevant officers to provide excellent service to the community. The nature of health service is providing excellent service to the community is a manifestation of the obligation of the state apparatus as a public servant. Realize that the task of government is to provide services to society, because the state had handed over all administrative services and health services to the government, so that the government shall implement the function in the best possible service with emphasis on community satisfaction. Government policies, particularly in improving the quality of health services, should always pay attention to the demands and dynamics of society, and the realization of quality health services is one feature of the success of an institution / government.

This study aimed to examine the implementation of Law No. 36 Year 2009 on Health in the handling and prevention of Non Communicable Diseases in the working area of Semarang City Health Department. Which factors become obstacles and solutions that can be done to overcome the obstacles in the implementation of Act No. 36 Year 2009 on Health in the handling and prevention of disease Melunar Not Working Area Health Service in the city of Semarang.

The approach used in this research is empirical juridical approach. Juridical approach is the approach in terms of legislation and legal norms in accordance with existing problems, whereas the empirical approach is to emphasize research aimed at gaining knowledge by way of empirical work directly to the field.

Based on the results of the study concluded that the health center, which is a unit of functional organization of the district health office has three main functions are: as the center of the area of health development, health and medical service providers a comprehensive, complete, integrated and sustainable to the people in the working area and the coaching role public health. PHC staff still felt obliged to run all programs of PHC is augmented by several new programs offered by the director general of the Ministry of Health Binkesmas. PHC was not obliged to implement the programs of 16 to 18, if the capability is not sufficient staff to do this. Not all courses are conducted by health center staff capable of effectively and with quality. Obstacles that may arise is the problem of funding, human resource development - education, health and social welfare-is not observed. PHC has not been seen as a tool to maintain the population's health and for the financing of health services for the poor. continued Umar, all health centers are experiencing problems. Solutions that can be done is that the government should pay attention to the layout of the development strategy of health centers, physician assignments, as well as provision of medicines, reporting should be tightened and existing programs such as enhanced cooperation with the district health office to introduce to the community health center and most important thing is operational funds for health centers, it is because sometimes the funds for the operations officers who complained about

long decline caused Puskesmas in the implementation of the program and its too late.

*Keywords: Treatment and Prevention of Non Communicable Diseases,
Community Health Center*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulisan tesis dengan judul PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NO. 36 TAHUN 2009 DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG ini merupakan salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan pada program Pascasarjana Unikaversitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) Semarang.

Secara umum tesis ini membahas hubungan antara undang- undang kesehatan dengan penyakit tidak menular. Dilihat dari data yang ada di kota Semarang masih banyak orang yang menggunakan jasa pelayanan penyakit tidak menular.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH,CN sebagai ketua program studi pascasarjana magister hukum kesehatan Fakultas hokum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan peluang bagi penulis guna mengikuti perkuliahan pada pascasarjana Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini ingin disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Pertama tama ucapan terima kasih yang setulus tulusnya disampaikan kepada yang terhormat Yovita Indrayani, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing utama dan yang terhormat dr. C. Tjahjono Kuntjoro, PhD selaku dosen pembimbing pendamping. Ditengah kesibukannya, kedua beliau telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penulisan tesis ini, dengan memberikan masukan, mengarahkan dan membimbing penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga di sampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH, CN, Yovita Indrayani, dr. C. Tjahjono Kuntjoro selaku anggota tim penguji tesis ini, atas masukan dan penharahannya yang sangat berharga dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Soegijapranata atas kesempatan yang diberikan untuk menenpuh studi pada program pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang. Terima kasih disampaikan juga kepada seluruh pengajar Fakultas Hukum kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini juga disampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pada program pascasarjana Unika Semarang, khususnya Angkatan VIII, atas bantuannya dan kerjasamanya selama menenpuh studi Magister Hukum Kesehatan pada program pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Kepada para staf sekretariat, Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang, penulis sampaikan terima kasih atas bantuan, dukungan dan kerja sama selama ini.

Terima kasih juga yang setulus tulusnya dan penghargaan di sampaikan kepada suamiku tercinta M. Munafir dan anakku Benhad Kurniawan dan Fila Delfia terima kasih atas segala pengertiannya dan pengorbanan serta doa yang telah diberikan.

Secara khusus ucapan terima kasih yang setulus- tulusnya dan penghargaan yang setinggi- tingginya disampaikan kepada yang terhormat dan yang tercinta bapak dan mama serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan bantuan moril selama menempuh studi pada program pascasarjana Unika. Dengan bantuan dan dukungan mereka, akhirnya studi pada program pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat diselesaikan, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, akhir kata semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini . Amin.

Semarang , Agustus 2010

Penulis,

Juraida Situmorang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Negara Hukum	22
B. Kesejahteraan dan Teori Negara Kesejahteraan	30
C. Pelayanan Kesehatan Masyarakat	43
D. Penyakit Tidak Menular	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Kota Semarang	50
B. Tugas dan Wewenang Dinas Kesehatan Kota	52

C. Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 dalam Penanganan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang	55
D. Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 dalam Penanganan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.....	81
E. Solusi untuk Mengatasi Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang	92
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108

LEMBAR PENGESAHAN

Usulan Penelitian

**Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Dalam Pencegahan dan
penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Wilayah Kerja Dings**

Kesehatan

Kota Semarang

Diajukan oleh :

JURAIDA

NIM. 07.93.0017

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Endang Wahyati, SH, MH.

Tgl.

16/10/09

Pembimbing Pendamping



dr. C. Tjahjono Kuntjoro, PhD

Tgl.

20/10/09